

## **SISTEM INFORMASI PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERBASIS VB.NET (STUDI KASUS: GERAJ SAMSAT SIMPANG KANTOR UPT MEDAN UTARA)**

**Febri Tika Sari<sup>1</sup>, Muhammad Iqbal Panjaitan<sup>2</sup>**  
Komputerisasi Akuntansi, Universitas Imelda Medan<sup>1</sup>,  
Email:[febritikasari@gmail.com](mailto:febritikasari@gmail.com)<sup>2</sup>, iqbal18@gmail.com<sup>1</sup>

### *Abstract*

*North Medan SAMSAT is one of the government agencies in charge of providing public services. One of the demands for reform in the field of public services is the service in the field of Motor Vehicle Tax (PKB) which is considered very slow, rigid and the intervention of brokers is very large which causes high costs in the administration of Motor Vehicle Tax. This condition causes taxpayers to feel lazy to take care of their motorized vehicle tax, causing a reduction in regional revenue from the Regional Tax sector. The problem in this research is, has the mechanism of motorized vehicle tax service been socialized to vehicle owners, what are the inhibiting factors for providing motorized vehicle tax services. To obtain data, it is done through library research and field research. Field research was conducted using observation and interview techniques. Based on the research, the service mechanism at the North Medan SAMSAT has been structured in such a way. Taxpayers can clearly know the steps and requirements that must be completed in the management of PKB. Processing of PKB for 1-year STNK type, the estimated time is approximately 10 minutes, while for 5-year STNK, it is approximately 60 minutes. Barriers to improving services in the form of internal and external factors. Internal constraints such as, the professionalism of personnel has not been maximized, some service desks do not include receipts, the service system is not entirely in accordance with what is written on the announcement board regarding Excellent Service Standards, external constraints for example, the services of brokers cannot be completely eliminated, the intervention of superior agencies is too far, public awareness of paying PKB has not been evenly distributed. The conclusion in this study is that the service at the North Medan SAMSAT has been structured in such a way, brokers are still an inhibiting factor in providing services. Therefore, it is recommended to take action against rogue brokers, expand the operation of mobile Samsat.*

**Keywords:** *Motor Vehicle Tax Payment System, North Medan Samsat*

### **Abstrak**

SAMSAT Medan Utara merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan publik. Salah satu tuntutan reformasi bidang pelayanan publik adalah pelayanan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dianggap sangat lamban, kaku dan campur tangan para calo yang sangat besar yang menyebabkan biaya tinggi dalam pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor. Kondisi ini menyebabkan wajib pajak merasa malas untuk mengurus Pajak kendaraan Bermotornya sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Apakah Mekanisme pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor sudah disosialisasikan kepada pemilik kendaraan, Apa yang menjadi faktor penghambat untuk memberikan pelayanan Pajak Kendaraan bermotor. Untuk memperoleh data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian, bahwa mekanisme pelayanan pada SAMSAT Medan Utara sudah tersusun sedemikian rupa. Wajib pajak dapat mengetahui secara jelas langkah-langkah dan persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengurusan PKB. Pengurusan PKB jenis STNK 1 tahun, estimasi waktunya lebih kurang 10 menit sedangkan untuk STNK 5 tahun, lebih kurang 60 menit. Hambatan untuk meningkatkan pelayanan berupa faktor internal dan external. Kendala internal seperti, profesionalisme personil belum maksimal, pada beberapa meja pelayanan tidak mencantumkan kwitansi, sistem pelayanan belum seluruhnya sesuai dengan yang tertulis pada papan pengumuman

tentang Standar Pelayanan Prima, kendala external misalnya, jasa calo belum dapat dihilangkan sepenuhnya, campur tangan instansi atasan terlalu jauh, kesadaran masyarakat membayar PKB belum merata. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, pelayanan pada SAMSAT Medan Utara sudah tersusun sedemikian rupa, percaloan masih menjadi faktor penghambat memberikan pelayanan. Oleh karenanya disarankan untuk menindak calo nakal, memperluas operasional Samsat keliling.

**Kata Kunci :** Sistem Pembayarn Pajak Kendaraan Bermotor, Samsat Medan Utara

## 1. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkan Pembangunan Nasional tersebut, Pemerintah bersama-sama dengan rakyat berusaha melaksanakan pembangunan di segala bidang, guna meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial. Dalam hal ini pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini terlihat jelas dalam kenyataannya, penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak sebagai penopang program pembangunan nasional.

Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar suatu daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat supaya pemerintah daerah dapat menggali sumber keuangan sendiri dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerahnya dan pelayanan masyarakatnya. Salah satu pajak daerah propinsi yang sangat menarik dan primadona dalam sumbangsuhnya terhadap penerimaan dalam kas daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dapat menambah serta menunjang pemasukan anggaran rumah tangga daerah Dilihat dari perkembangan teknologi sekarang ini, dimana semakin banyak masyarakat memiliki kendaraan bermotor untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Oleh karena itu, Pajak Kendaraan Bermotor menjadi primadona dalam memberikan pemasukan dan pendapatan yang lebih besar daripada jenis-jenis pajak daerah lainnya. Dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ini, besarnya jumlah Pajak yang terutang ditetapkan dan dihitung oleh fiskus sebagai pemungut Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan Wajib Pajak mempunyai tanggung jawab menyeter besarnya jumlah pajak yang terutang tersebut. Sistem inilah yang disebut system official assessment. Dari sistem ini terlihat bahwa pihak fiskus mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah. Dalam menjalankan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor, wajib pajak memerlukan sarana administrasi yang jelas dan harus mengetahui dengan jelas prosedur untuk menyampaikan serta memenuhi kewajiban tersebut. Sarana tersebut adalah Surat Pembeitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dengan mengetahui dan menguasai prosedur dan tata cara pengisian SPTPD, maka diharapkan tidak terjadinya kesalahan dan ketimpangan yang sering dilakukan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi dan menjalankan kewajibannya. Minimnya pengetahuan wajib pajak dalam melakukan penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor, menyebabkan terjadinya kesalahan dalam sistem administrasi

## 2. METODELOGI PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang akurat dalam penulisan ini, akan digunakan metode : **Observasi Teknik**, observasi dilakukan dengan jalan melakukan pengamatan secara langsung dalam kegiatan-kegiatan, struktur organisasi, sejarah singkat perusahaan. **Penelitian Lapangan (field research)**, Penelitian lapangan dimaksud untuk melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti disertai pencatatan hasil pengamatan. **Penelitian Kepustakaan (library research)**, Penelitian kepustakaan suatu metode yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan dan landasan teoritis dalam menganalisa data dan permasalahan melalui karya tulis, dan sumber-sumber lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan tugas akhir ini.

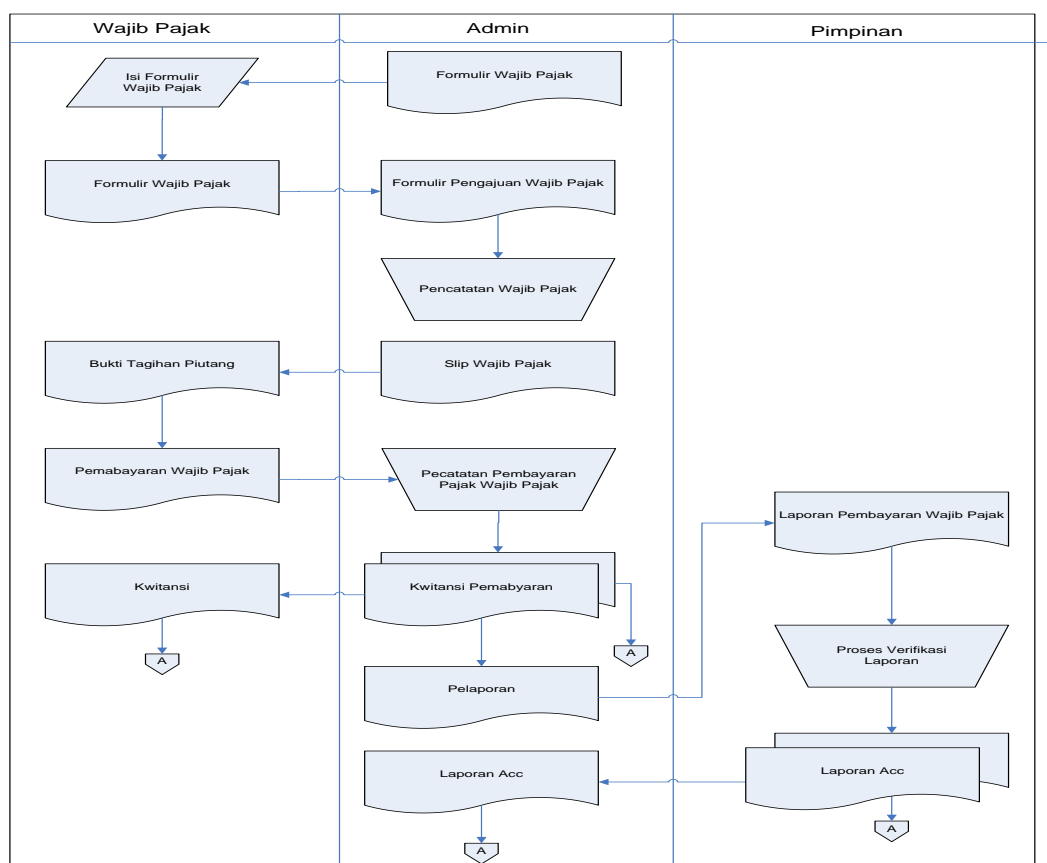
## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan

Adapun langkah-langkah tahapan analisa yang penulis lakukan yaitu mengidentifikasi masalah, mengerti dan mamahami sistem yang ada dan menganalisa hasil dari masalah. Dimana hasil analisa yang sedang berjalan di instansi Garai Samsat Simpang Kantor sering terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pembayaran wajib pajak dan kuarng nya validasi data wajib pajak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan melihat hasil analisa dimana penulis merancang sebuah sistem pembayaran pajak kendaraan beromotor dengan menggunakan bahasa pemogramman *visual basic.net* dan untuk penyimpanan data wajib pajak dan pembayaran pajak menggunakan database mysql serta untuk pembayaran laporan menggunakan crystal report 8.5. Penulis terlebih dahulu menggambarkan sistem yang akan di implementasikan dengan mendeskripsikan menggunakan DFD dan perancangan tampilan.

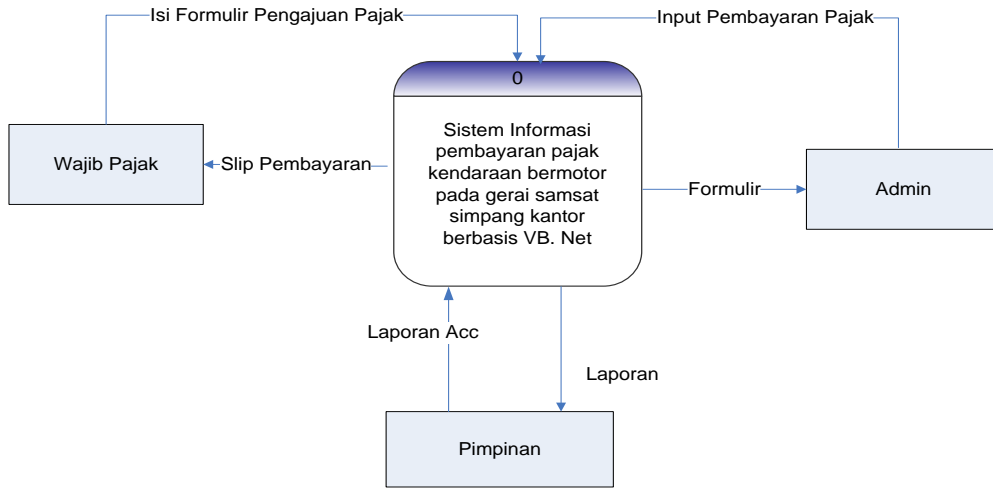
### 3.2. Aliran Informasi (Flow of Document)

Berikut ini aliran informasi pembayaran pajak yang sedang berjalan di Instasi Samsat Simpang Pos dapat di lihat di gambar berikut:



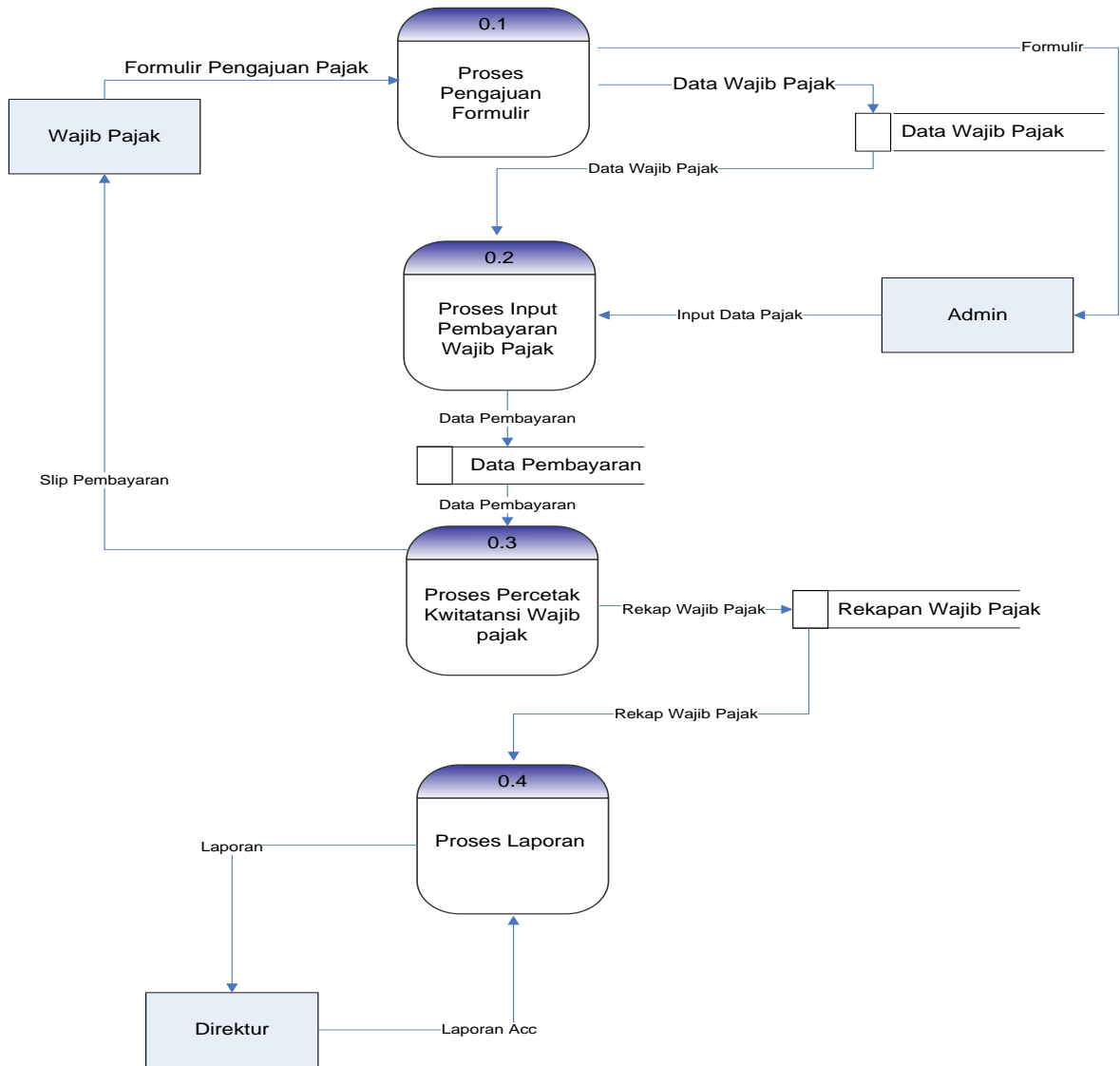
Gambar 1. Flow Of Document Sistem Berjalan

### 3.3. Data Flow Diagram Context Diagram



**Gambar 2. Context Diagram**

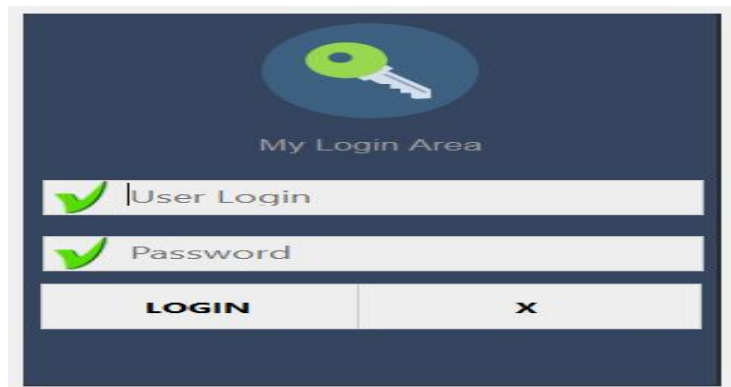
**3.4. DFD Level 0**



**Gambar 3. DFD Level 0**

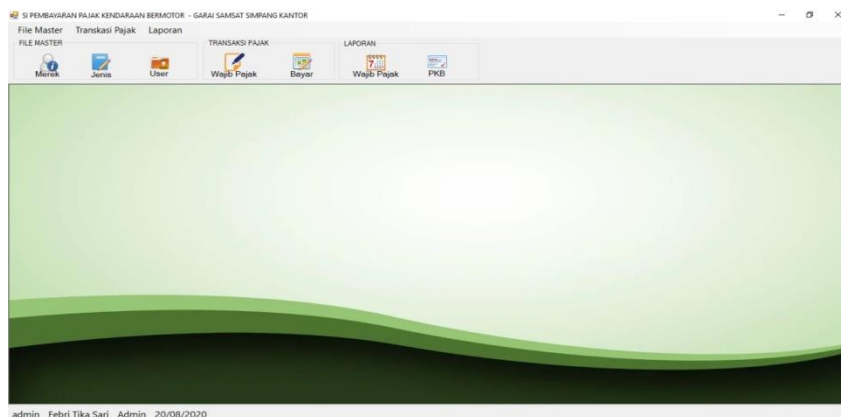
### 3.5. Perancangan Input

#### Tampilan Login



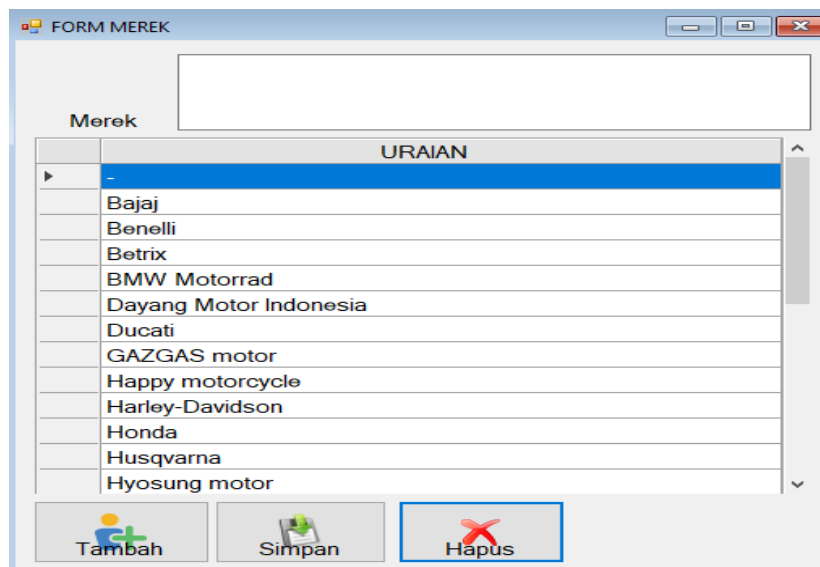
Gambar 4. Tampilan Login

#### Tampilan Menu Utama



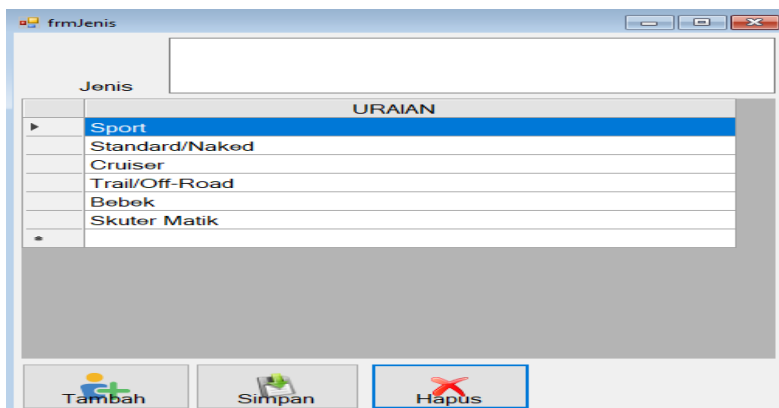
Gambar 5. Tampilan Menu Utama

#### Tampilan Master File Merek



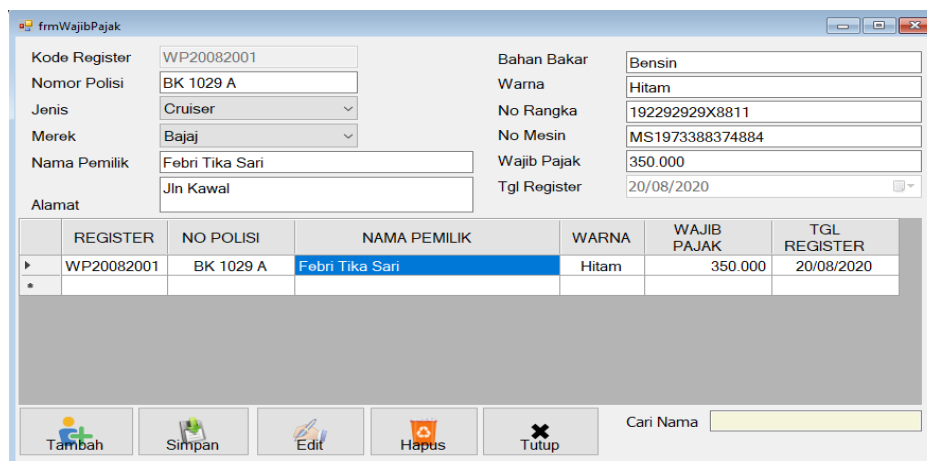
Gambar 6. Tampilan Master Filr Merek

### Tampilan Master File Jenis



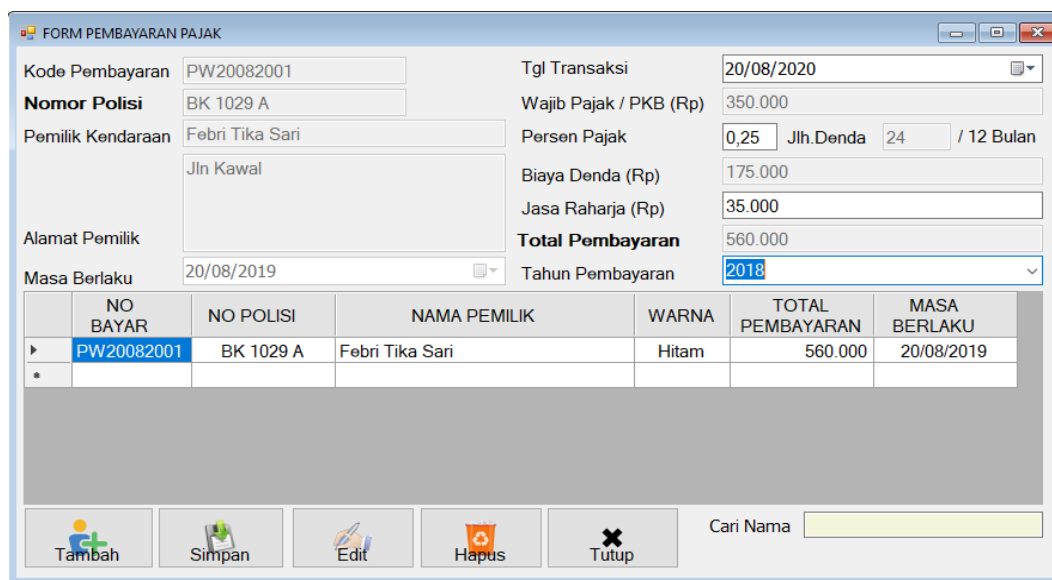
Gambar 7. Tampilan Master File Jenis

### Tampilan Form Input Wajib Pajak



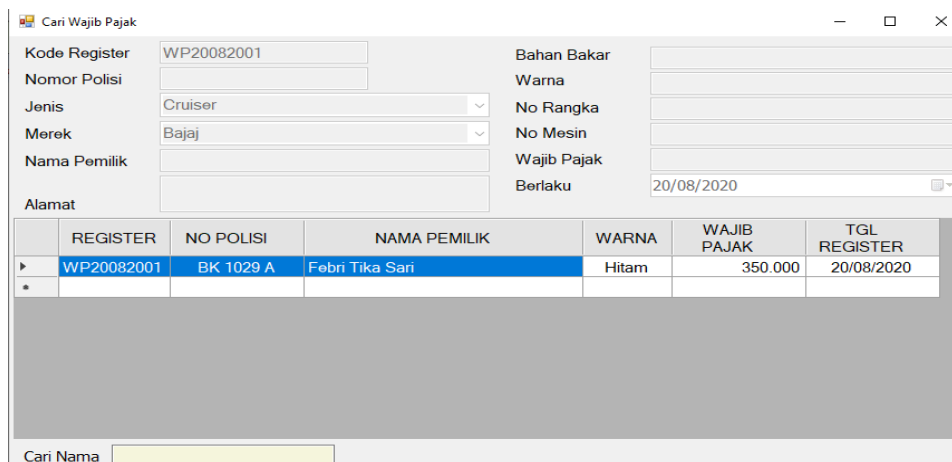
Gambar 8. Tampilan Form Input Wajib Pajak

### Tampilan Form Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor



Gambar 9. Tampilan Form Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

### Tampilan View Cari Wajib Pajak



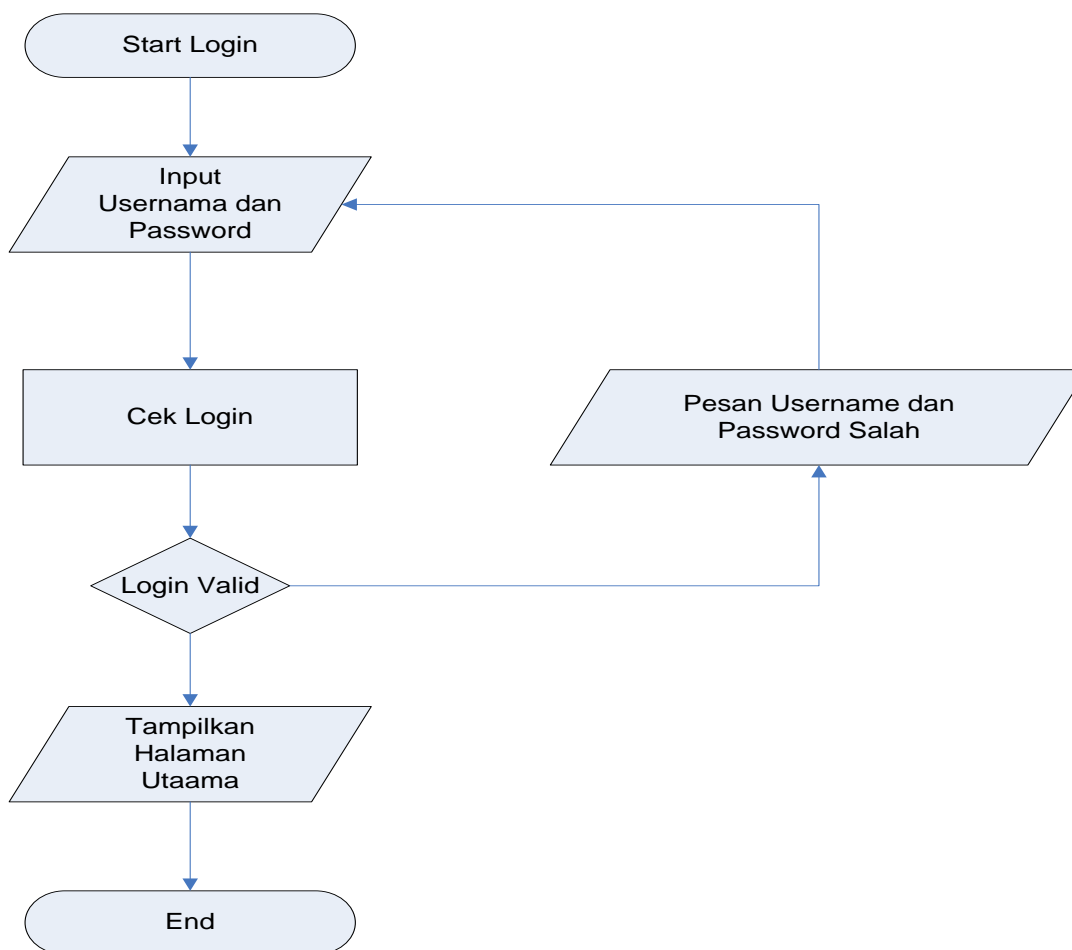
REGISTER	NO POLISI	NAMA PEMILIK	WARNA	WAJIB PAJAK	TGL REGISTER
WP20082001	BK 1029 A	Febri Tika Sari	Hitam	350.000	20/08/2020

Gambar 10. Tampilan View Cari Wajib Pajak

### 3.6. Rancangan Logika Program

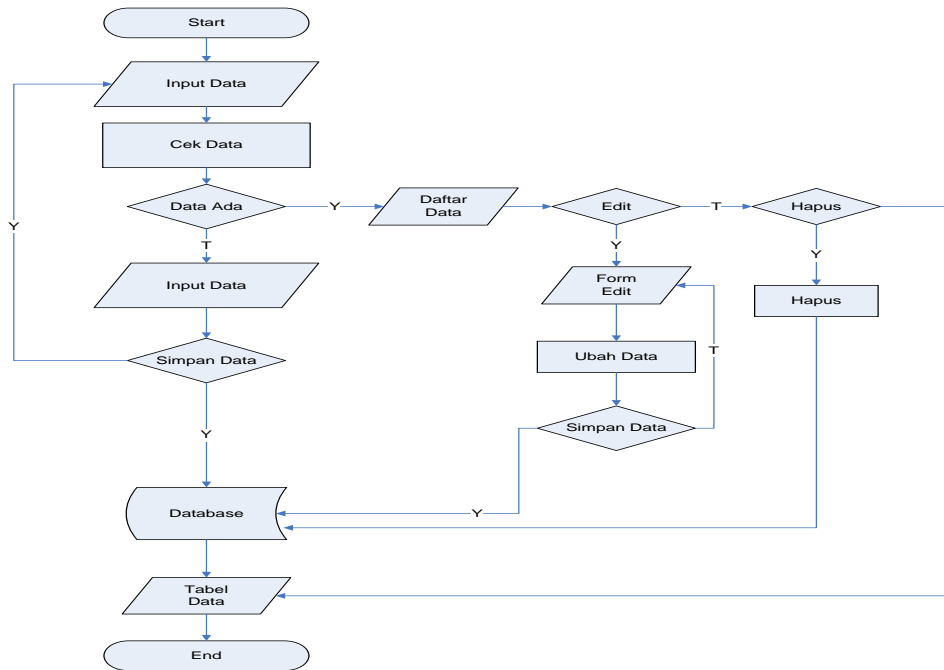
#### Program FlowChart

##### 1. Logika Login Sistem



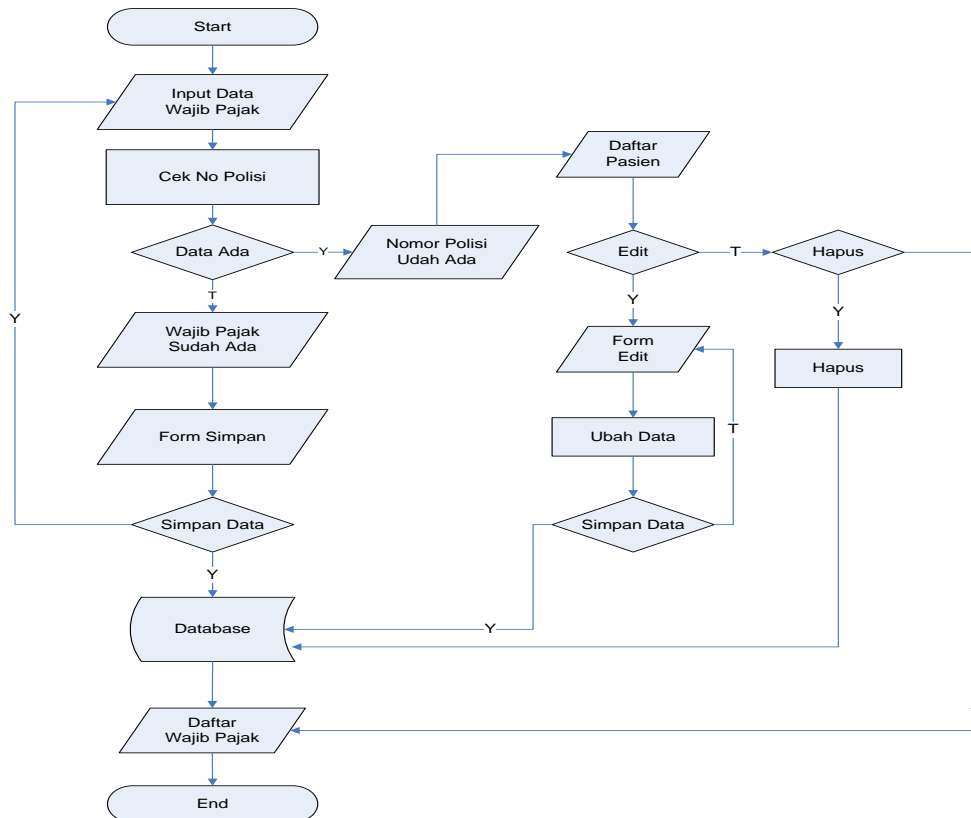
Gambar 11. Logika Login Sistem

## 2. Logikan Master File Data Sistem Pajak Kendaraan Sepeda Motor



Gambar 12. Logika Master File Data Sistem Pajak Kendaraan Sepeda Motor

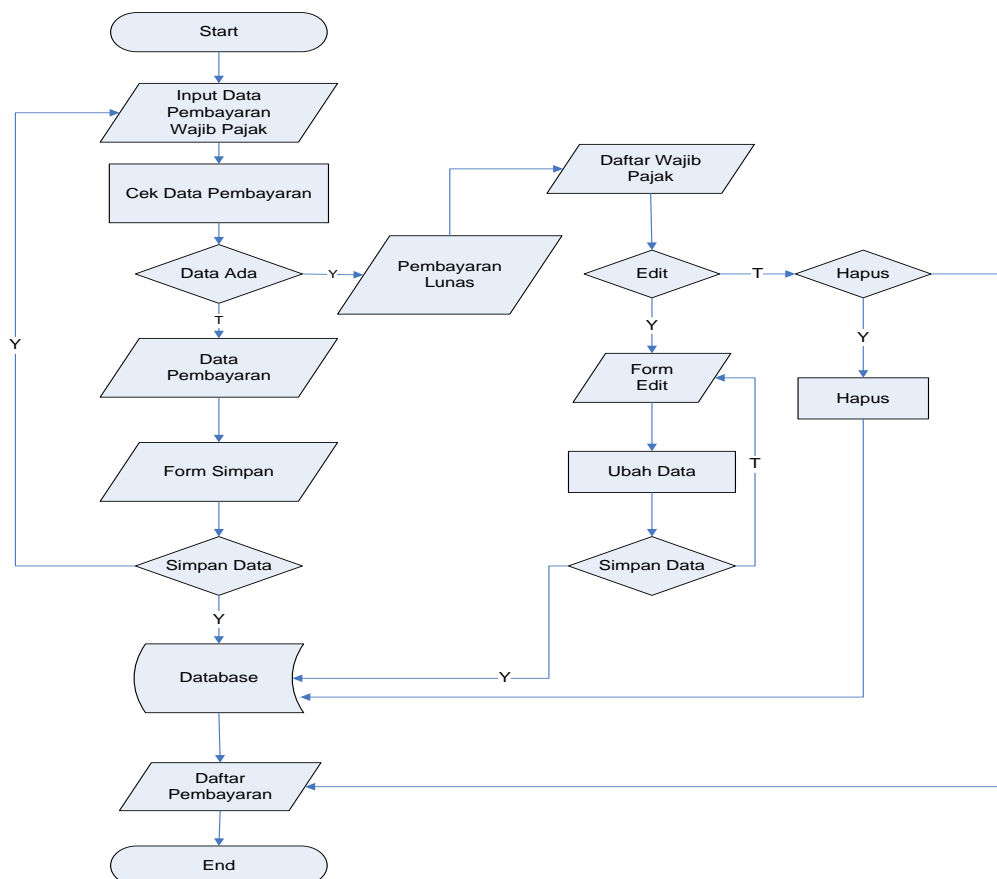
## 3. Logikan Tambah Wajib Pajak





Gambar 13. Flowchart Logika Wajib Pajak

#### 4. Logika Pembayaran Pajak



Gambar 14. Flowchart Logika Pembayaran Pajak

#### 4. KESIMPULAN

1. Sistem Informasi Pembayaran Pajak Kendaraan di Samsat di kota medan yang sedang berjalan sudah berjalan dengan baik, yang sebelumnya dilakukan secara manual telah berubah menjadi sebuah sistem yang terkomputerisasi sehingga pada pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat berjalan dengan efektif dan efisien
2. Sistem informasi pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan tingkat persetujuan dari masing-masing dimensi
3. Kinerja pegawai di Samsat di kota medan sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan tingkat persetujuan dari masing-masing dimensi
4. Sistem informasi pembayaran pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kinerja pegawai samsat di kota medan dilihat dari korelasi

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Menurut Sutabri (2012:6), Pengertian Pengolahan data
- [2]. Menurut Taufiq (2013:13), Devinisi Data
- [3]. Menurut Deni Darmawan dan Kunkun Nur Fauzi (2013:1), Devinisi Data
- [4]. Menurut Nana Mulyana (2004), Pengertian Komputerisasi Akuntansi

- [5]. Menurut Tata Sutabri (2012:13), Karakteristik Sistem
- [6]. Menurut Raymond McLeod, Pengertian informasi
- [7]. Amalia, R dkk. 2016. Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- [8]. Irianingsih, E. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
- [9]. Novitasari, R. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak
- [10]. Chasanah, O. E. N dan Drs. M. Abdul Aris, M.Si. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat
- [11]. Hidayati, I. F. 2014. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- [12]. Nugraha, A. I. R. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
- [13]. Sari, R. A. Vivi Yulian dan Neri Susanti. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) di Unit Pelayanan Pendapatan
- [14]. Wardani, D. K dan Rumiya. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- [15]. Irianingsih, E. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan bermotor